

**LAPORAN SELF ASSESMENT
PELAKSANAAN GCG
PT. BANK LAMPUNG
POSISI : 31-DESEMBER-2017**

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	3
3	Komite Komite	3
4	Benturan Kepentingan	2
5	Fungsi Kepatuhan Bank	3
6	Fungsi Audit Intern	3
7	Fungsi Audit Ekstern	2
8	Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3
9	Prinsip Kehati hatian Dalam Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar	2
10	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal	2
11	Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank Umum	3
NILAI KOMPOSIT PREDIKAT		3

ANALISIS

Secara Komposit *Self Assessment* GCG PT. Bank Lampung berada pada **Peringkat Komposit 3 (Cukup Baik)**, yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum Cukup Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Kelemahan-kelemahan dalam penerapan GCG :

1. Governance Structure

- Terdapat kekosongan jabatan pada Komisaris Utama (melalui RUPS-LB ditunjuk sebagai Pjs. Direktur Utama) yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi, sehingga mengakibatkan komposisi jumlah Komisaris dan Komite tidak terpenuhi serta pelaksanaan fungsi tugas dan tanggung jawab menjadi kurang optimal;
- Struktur Organisasi Bank belum mendukung terciptanya *risk control system* dan internal control;
- Masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap beberapa hal diantaranya: Ketersediaan SDM dengan kompetensi sebagai auditor terbatas, terutama dibidang kredit, Manajemen Risiko, akuntansi dan IT. Jumlah personil juga tidak memadai dibandingkan jumlah kantor cabang operasional /Bank. Belum tersedianya aplikasi audit yang terstruktur/tersistem dalam menunjang kinerja audit intern;

2. Governance Process

- Efektifitas pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi rapat Direksi terhadap pencapaian target Bisnis masih belum optimal
- Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG masih belum optimal, dan perlu pembenahan di beberapa tingkatan struktur organisasi saat ini;
- Masih terdapat temuan audit internal dan eksternal yang belum ditindaklanjuti;
- Budaya kepatuhan bank belum seluruhnya dipahami dan diterapkan oleh pegawai bank terutama di kantor Operasional, hal ini tercermin dengan intensitas pelanggaran yang cukup tinggi.
- Review dan penyusunan kebijakan sesuai kondisi Bank saat ini belum dilakukan secara menyeluruh
- Masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap beberapa hal diantaranya : Dalam pelaksanaannya audit masih fokus pada kegiatan-kegiatan operasional dan kualitas kinerja, sedangkan penilaian kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern bank belum optimal. Audit belum didukung sistem informasi yang memadai, Rencana pemeriksaan SKAI belum terealisasi secara keseluruhan.
- Belum sepenuhnya kecukupan infrastruktur (adanya tools risiko) dalam mengendalikan risiko sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Telah dilakukan sosialisasi budaya sadar risiko secara bertahap kepada seluruh jenjang organisasi secara berkelanjutan, namun implementasinya belum maksimal.
- Masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap: Komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank, Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang dinilai oleh Regulator belum realistis atas pencapaian dari target-target yang telah ditetapkan, komprehensif dan terukur serta penyusunan RBB dan *Corporate Plan* belum didukung oleh sistem dan prosedur yang memadai;

3. Governance Outcome

- Hasil rapat komite belum dapat memberikan rekomendasi yang berdampak positif bagi peningkatan dan kelangsungan usaha Bank.
- Masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap beberapa hal diantaranya : Pelaksanaan audit belum mencakup keseluruhan unit kerja, proses audit berbasis risiko belum dilakukan secara optimal.
- Masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen.

Kertas Kerja

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.6667

Tujuan

Governance Structure berada pada peringkat 2 (baik), hal ini terlihat dari lengkapnya struktur Dewan Komisaris Governance Process dan Governance Outcome Bank berada pada peringkat 3 (cukupbaik) pelaksanaan aktivitas, rapat, evaluasi/review berkala oleh Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi namun belum semuanya optimal.

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi	Sampai dengan 31 Desember 2017 Komposisi Anggota berjumlah 3 (tiga) orang dengan keterangan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Purwantari Budiman (Komisaris Utama - Komisaris Independen) • Lukman Hakim (Komisaris Independen) • Zaidirina (Komisaris Non Independen) 	1
2	Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia	Seluruh Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia, yang berdasarkan data : <ol style="list-style-type: none"> 1. Purwantari Budiman - Berdomisili di Kota Jakarta Pusat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171064805550003 2. Lukman Hakim - Berdomisili di Kota Metro, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 187201307520001 3. Zaidirina - Berdomisili di Kota Bandar Lampung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1871015110690006 	1
3	Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen	Dari 3 orang anggota Dewan Komisaris, 2 orang merupakan Komisaris Independen, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Purwantari Budiman (Komisaris Utama - Komisaris Independen) 2. Lukman Hakim (Komisaris Independen) 	1
4	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif : <ol style="list-style-type: none"> 1. pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau 2. yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank. 	Tidak terdapat perangkapan jabatan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 28 POJK No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.	1

5	Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.	Telah sesuai Pasal 46 POJK Nomor 55 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 12/KEP/DK/BL-2/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Tentang Perubahan Lampiran pada SK DEKOM No. 01/KEP/DK/BL-2/III/2016 Tentang Penyempurnaan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT. BPD Lampung, dengan Komposisi sebagai berikut : Komite Audit 1. Lukman Hakim (Komisaris Independen)-Ketua sekaligus anggota Komite 2. M. Herjuno (Pihak Independen) - anggota Komite 3. Einde Evana (Pihak Independen) - anggota Komite Komite Pemantau Risiko 1. Purwantari Budiman (Komisaris Utama Independen) - Ketua sekaligus anggota Komite 2. Lukman Hakim (Komisaris Independen) - anggota Komite 3. Supreh (Pihak Independen) - anggota Komite 4. (Kosong) - dalam Proses rekrutmen Komite Remunerasi dan Nominasi 1. Lukman Hakim/ Komisaris Independen - Ketua sekaligus anggota komite 2. Purwantari Budiman/ Komisaris Utama Independen- anggota komite 3. Zaidirina/ Komisaris Non Independen- anggota komite 4. Ahmad Jahri/ Perwakilan Pegawai- anggota komite 5. Mutia Citra/ Pihak Independen- anggota Komite	2
6	Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Komisaris dan atau Direksi	1
7	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/KEP/DK/BL-2/III/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Penyempurnaan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT. BPD Lampung dan sebagaimana perubahan terakhir yaitu SK Dewan Komisaris No. 12/KEP/DK/BL-2/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Tentang Perubahan Lampiran pada SK DEKOM No. 01/KEP/DK/BL-2/III/2016 Tentang Penyempurnaan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT. BPD Lampung	2
8	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai tercermin dari hasil kelulusan fit & proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan.	2
9	Anggota Dewan Komisaris independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank sendiri telah menjalani masa tunggu cooling off paling kurang selama 1 (satu) tahun	Telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.	2

10	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan kepengurusan kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya telah bertindak independen, tidak terdapat campur tangan atau intervensi dari pemegang saham.	2
11	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus fit and proper test dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	1
12	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat manajemen risiko level 2 dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan internal Bank serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	2
13	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Dalam rangka peningkatan kompetensi terus dilakukan secara berkelanjutan sebagaimana tertuang didalam Rencana Bisnis Bank 2017-2019	2
14	Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik	Komposisi anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan Tata Kelola Bank Umum	1
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS

N O	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS	Bank telah memiliki pedoman dan prosedur penggantian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus sebagaimana tertuang dalam SK Dewan Komisaris No. 02/DK/BL-2/II/2017	2
2	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	2

3	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu waktu serta memberikan nasehat kepada Direksi	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai Surat Nomor : 1. 146/DK/BL-2/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal tindak lanjut Management letter KAP 2. 183/DK/BL-2/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 perihal tindak lanjut Management letter KAP. 3. 172/DK/BL-2/XI/2017 tanggal 8 Agustus 2017 perihal Evaluasi APU dan PPT Tahun 2017 4. 213/DK/BL-2/IX/2017 tanggal 23 September 2017 arahan terkait penyelesaian suspense account 5. 254/DK/BL-2//X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal arahan Dewan Komisaris atas hasil pekerjaan konsultan penyusunan BPP Tata Kelola Remunerasi PT. Bank Lampung 6. 291/DK/BL-2/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 terkait tindak lanjut penyelesaian suspense account Rp. 1 Milyar pada Cabang Kalianda 7. 283/DK/BL-2/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 Evaluasi dan Kajian cut off iuran dana pensiun Direksi. 8. 287/DK/BL-2/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 perihal arahan draft ke-2 penyusunan BPP remunerasi sesuai POJK 45 9. 291/DK/BL-2/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal Evaluasi terhadap kebijakan PT. Bank Lampung dalam penggunaan teknologi Informasi	2
4	Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Komisaris telah mengarahkan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank	Dewan Komisaris telah mengarahkan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank sesuai Surat Nomor 257/DK/BL-2/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal evaluasi RBB Triwulan III Tahun 2017.	2
5	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank.	2
6	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern SKAI Bank auditor eksternal hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya	Sesuai Surat Nomor: 1. 03/DK/BL-2/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 perihal tindak lanjut hasil temuan BPK atas beban sewa kendaraan pinjam pakai. 2. 146/DK/BL-2/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal tindak lanjut Management letter KAP 3. 183/DK/BL-2/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 perihal tindak lanjut Management letter KAP. 4. 185/DK/BL-2/XI/2016 tanggal 2 November 2016 perihal tindak lanjut hasil temuan audit eksternal dan Internal	2
7	Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 tujuh hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank	Jika terdapat pelanggaran yang berdampak signifikan terhadap aktivitas bank, akan disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.	2

8	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen	Sesuai laporan Pengawasan RBB PT. Bank Lampung Semester I Tahun 2017 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung.	2
9	Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi	Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana SK Dewan Komisaris No. 12/KEP/DK/BL-2/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Tentang Perubahan Lampiran pada SK DEKOM No. 01/KEP/DK/BL-2/III/2016 Tentang Penyempurnaan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT. BPD Lampung.	2
10	Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris	Sesuai dengan Risalah Rapat Dewan Komisaris Tanggal 12 Desember 2017 dengan agenda pembahasan: <ol style="list-style-type: none"> • Penjelasan Ketentuan Yang Mendasari Pengangkatan Komite Termasuk masa kerja komite. • Penilaian Kinerja Anggota Komite PT. BPD Lampung Tahun 2017. Dari hasil penilaian kinerja diperoleh keputusan dilakukan perpanjangan kontrak Komite Pihak Independen eksisting.	2
11	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif	Bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	2
12	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab telah dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan tingkat kehadiran = 75% - 99%, namun efektifitas terhadap bank belum maksimal	2
13	Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 kali dalam setahun dan dihadiri secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 kali setahun	Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara rutin	2
14	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat	Keputusan dapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.	2
15	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi keluarga dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan	Anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana ketentuan dan peraturan dari regulator.	2
16	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Anggota Dewan Komisaris hanya menerima dari Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	2
17	Pemilik melakukan intervensi thd pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pd berkurangnya keuntungan Bank dan atau menyebabkan kerugian Bank	Anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana ketentuan dan peraturan dari regulator.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			3

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
----	--------------------	-------------------------	-----------

1	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk dissenting opinions yang terjadi secara jelas	Notulen rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk dissenting opinions yang terjadi secara jelas.	2
2	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait	Notulen rapat telah dibagikan kepada seluruh komisaris dan pihak terkait.	2
3	Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan atau Direksi	Rekomendasi dari Dewan Komisaris belum secara menyeluruh dapat diimplementasikan oleh Direksi.	2
4	Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap di laporan pelaksanaan GCG Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5 atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain di dalam dan di luar negeri Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank Remunerasi dan fasilitas lain	Pengungkapan kepemilikan saham seluruh anggota Komisaris, telah dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan GCG dan telah dilaporkan kepada Regulator sesuai ketentuan yang berlaku.	2
5	Peningkatan pengetahuan keahlian dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukan antara lain dengan peningkatan kinerja bank penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dekom shares option yang dimiliki Dewan Komisaris	Peningkatan pengetahuan keahlian dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank 2017-2019.	2
6	Kegiatan operasional Bank terganggu dan atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan atau menyebabkan kerugian Bank akibat intervensi pemilik thdp komposisi dan atau pelaksanaan tugas Dekom	Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			3

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	3

Tujuan

Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome berada pada peringkat 3 (cukup baik), hal ini terlihat dari :

Belum lengkapnya struktur Direksi sehingga terjadi rangkap jabatan

Sampai dengan laporan ini dibuat komposisi anggota Dewan Direksi pada PT Bank Lampung tidak lengkap dan tidak memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Muhammad Syahroni sebagai Direktur Bisnis yang merangkap menjadi Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama;
2. Yuzar Herrysonatama sebagai Direktur Kepatuhan;
3. Mustofa Endi Saputra Hasibuan sebagai Direktur Operasional.

Meskipun terdapat rangkap jabatan, hal tersebut berpengaruh pada proses pengambilan keputusan rapat.

Masih terdapat temuan audit internal dan eksternal namun Direksi tetap berusaha menyelesaikan temuan-temuan tersebut.

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT

1	Jumah anggota Direksi paling kurang 3 orang	Sampai dengan Laporan ini dibuat, komposisi anggota Direksi pada PT Bank Lampung belum lengkap namun sudah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Adapun susunan Direksi PT. Bank Lampung sampai dengan Desember 2017 adalah sebagai berikut : 1. M. Syachroni sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama yang merangkap sbg Direktur Bisnis; 2. Yuzar Herrysonama sebagai Direktur Kepatuhan; 3. Mustopa Endi Saputra Hasibuan sebagai Direktur Operasional.	3
2	Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.	1
3	Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank kecuali untuk Bank Syariah minimal 2 tahun	Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman di perbankan lebih dari 5 tahun	1
4	Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang pelaksanaan GCG Bagi Bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank	Sampai dengan akhir laporan ini dibuat tidak ada perangkapan jabatan direksi pada lembaga lain diluar Bank Lampung, hal ini sesuai dengan surat pernyataan pribadi dari masing-masing anggota Direksi yang menyatakan tidak merangkap jabatan yang disampaikan pada saat pencalonan yang bersangkutan.	1
5	Anggota Direksi baik secara sendiri sendiri atau bersama sama tidak memiliki saham melebihi 25 dari modal disetor pada perusahaan lain	Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan atau pada suatu perusahaan lain.	1
6	Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi dan atau dengan anggota Dekom	Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi lainnya dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris	1
7	Penggantian dan atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi	Penggantian dan Pengangkatan Direksi telah dilaksanakan melalui <i>fit & proper test</i> dan ditetapkan melalui RUPS.	2
8	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja waktu kerja dan rapat	Bank telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 04.A/K/BL/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Tata Tertib dan Pedoman Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Derah Lampung.	2
9	Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus telah didasari kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja tanggung jawab jangka waktu pekerjaan dan biaya serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus	Secara struktural perangkat pendukung pekerjaan Direksi telah cukup lengkap namun pada beberapa pekerjaan yang bersifat khusus dan membutuhkan keahlian tertentu, bank menggunakan tenaga ahli dari pihak/eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	3
10	Seluruh anggota Direksi memiliki integritas kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai	Anggota Direksi telah dinyatakan LULUS <i>fit & proper test</i> oleh Regulator	2
11	Presiden Direktur atau Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan kepengurusan kepemilikan saham dan hubungan keluarga	Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan Pemegang saham pengendali.	1

12	Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit dan Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia	Direksi telah dinyatakan LULUS <i>Fit and Proper test</i> oleh Regulator	2
13	Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Anggota Direksi telah memiliki kompetensi yang cukup dan relevan dengan jabatannya, dan berasal dari kalangan perbankan	2
14	Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Anggota Direksi turut serta melakukan pembelajaran dan peningkatan pengetahuan melalui pelatihan/training /sosialisasi/workshop/study banding.	2
15	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pd seluruh tingkatan atau jenjang organisasi	Direksi secara konsisten tetap membudayakan pembelajaran yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan dibidang perbankan dan perkembangan terkini.	2
16	Komposisi direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik	Komposisi Direksi telah lengkap dan telah memenuhi ketentuan, tanpa adanya intervensi pemilik	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			3

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Direksi telah mengangkat anggota Komite didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris	Direksi mengangkat anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi atas Keputusan Rapat Dewan Komisaris.	2
2	Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi	Operasional bank tetap dibawah kewenangan Direksi, dan tidak ada pengalihan kewenangan kepada pihak lain diluar organisasi bank	2
3	Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank	Pertanggungjawaban Direksi disampaikan didalam RUPS tahunan.	1
4	Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku	Direksi melaksanakan operasional Bank sesuai Anggaran Dasar dan perundangan yang berlaku, yang dituangkan dalam tata tertib dan pedoman kerja Direksi.	1
5	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan secara independen, tanpa campur tangan dari pemegang saham / pemilik.	2
6	Direksi telah melaksanakan prinsip ndash prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi	Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG masih belum optimal, dan perlu pembenahan di beberapa tingkatan struktur organisasi saat ini.	3
7	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern SKAI Bank auditor eksternal hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya	Hasil temuan audit intern dan ekstern telah ditindaklanjuti sebagian, serta terus dilakukan upaya pemantauan/monitoring penyelesaian kasus hukum Bank kepada pihak yang berwenang.	3
8	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap akurat kini dan tepat waktu kepada Komisaris	Direksi telah memenuhi data dan informasi yang dimintakan oleh Komisaris.	2
9	Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat	Dalam risalah rapat Direksi, keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat.	2

10	Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku	Keputusan Rapat Direksi belum seluruhnya terimplementasi.	3
11	Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi	Rapat Direksi telah dilaksanakan sesuai tata tertib Rapat Direksi (<i>quorum</i>), dan telah diterbitkan sejumlah kebijakan dibidang Bisnis, Operasional maupun Kepatuhan. Namun perlu ditingkatkan efektifitasnya.	3
12	Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi keluarga dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan	Sampai saat ini, tidak ditemukan adanya indikasi dan bukti tertulis bahwa Direksi memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	2
13	Direksi tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Direksi hanya menerima tunjangan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Namun demikian terdapat kebijakan lain yang memberikan fasilitas tambahan kepada Direksi antara lain: biaya telepon, biaya penggantian kacamata, biaya perjalanan dinas.	2
14	Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan atau menyebabkan kerugian Bank	Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan operasional bank sehingga Direksi dalam melaksanakan operasional Bank telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Perundangan yang berlaku yang tertuang dalam tata tertib dan pedoman kerja Direksi.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			3

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS	Pertanggungjawaban Direksi pada pemegang saham telah dilaksanakan pada RUPS Tahunan tanggal 24 Mei 2017.	2
2	Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS	Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya telah diterima oleh pemegang saham melalui RUPS tahunan	2
3	Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai	1. Bank telah memiliki media publikasi berupa website yang dapat diakses secara online, namun belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pemberian informasi/kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis dibidang kepegawaian. 2. Pelaksanaan kebijakan saat ini masih bersifat manual/atau pencatatan tertulis. Saat ini dalam proses integrasi pengembangan sistem.	3
4	Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank	Bank telah menetapkan <i>Corporate Plan</i> dan <i>Business Plan</i> (Rencana Bisnis Bank), telah dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris dan telah disampaikan kepada seluruh Unit kerja.	2
5	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi	Risalah rapat Direksi telah didokumentasikan dengan baik, pengungkapan dissenting opinion telah dicantumkan didalam notulen rapat. Namun pengungkapan dalam risalah rapat perlu lebih terinci dan transparan.	3

6	Dalam laporan pelaksanaan GCG seluruh anggota Direksi paling kurang telah mengungkapkan a Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5 atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain di dalam dan di luar negeri b Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank c Remunerasi dan fasilitas lain d shares option yang dimiliki Direksi	Laporan Pelaksanaan GCG dilaporkan tiap tahun tepat waktu yang memuat pengungkapan tentang kepemilikan saham, hubungan Dekom, Direksi dan/atau pemegang saham, remunerasi dan <i>shares option</i> sesuai ketentuan.	2
7	Peningkatan pengetahuan keahlian dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan a l dengan peningkatan kinerja Bank penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Anggota Direksi berasal dari mantan pegawai bank yang telah berpengalaman dalam bidang perbankan, selain itu juga anggota direksi secara kontinyu tetap berupaya meningkatkan kompetensinya melalui forum seminar, diklat sesuai dengan bidang kemampuannya.	2
8	Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pd seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan a l dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan atau pendidikan diklat dalam rangka pengembangan kualitas individu	Peningkatan kompetensi pegawai telah diprogramkan secara rutin melalui program kerja Group SDM yang telah dianggarkan ke dalam Rencana Bisnis Bank. Pelaksanaannya dilakukan oleh pihak eksternal maupun pihak internal. Sudah ditetapkan Melalui SK. Direksi untuk Penilaian Kinerja Pegawai.	2
9	Peningkatan pengetahuan keahlian dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan a l dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya	Peningkatan kompetensi pegawai telah diprogramkan secara rutin melalui program kerja Group SDM yang telah dianggarkan ke dalam Rencana Bisnis Bank. Pelaksanaannya dilakukan oleh pihak eksternal maupun pihak internal. Sudah ditetapkan Melalui SK. Direksi untuk Penilaian Kinerja Pegawai.	2
10	Kegiatan operasional Bank terganggu dan atau akibata intervensi pemilik thd komposisi dan atau pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu dan atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kpd pemilik yang berdampak pd berkurangnya keuntungan Bank	Sampai saat ini, tidak ditemukan adanya indikasi dan bukti tertulis bahwa pemilik memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank akibat intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Direksi.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			3

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
3	Komite Komite	3

Tujuan

Governance Structure dan *Governance Process* berada pada peringkat 3 (cukup baik), hal ini dapat dilihat dari :

Bank telah membentuk Komite audit, komposisi komite audit telah memenuhi ketentuan regulator yang terdiri atas:

Lukman Hakim (Komisaris Independen/Ketua Komite Audit)

Einde Evana (Pihak Independen/Anggota Komite Audit)

M. Herjuno (Pihak Independen/Anggota Komite Audit)

Mekanisme rapat komite dilaksanakan sesuai pedoman dan tata tertib kerja komite serta mekanisme hubungan kerja Dekom, Direksi, Komite dan Group-Group.

Governance Outcome Bank berada pada peringkat 3 (*cukup baik*), hal ini terlihat dari Kecukupan Komposisi Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Lukman Hakim/ Komisaris Independen – Ketua sekaligus anggota komite

Purwanti Budiman/ Komisaris Utama Independen- anggota komite
 Zaidirina/ Komisaris Non Independen- anggota komite
 Ahmad Jahri/ Perwakilan Pegawai- anggota komite
 Mutia Citra/ Pihak Independen- anggota Komite

Namun masih terdapa 1 kekosongan dalam anggota Komite Pemantau Risiko, yang terdiri atas:

Purwanti Budiman (Komisaris Utama Independen) – Ketua sekaligus anggota Komite

Lukman Hakim (Komisaris Independen) – anggota Komite

Supreh (Pihak Independen) – anggota Komite

(Kosong) – dalam Proses rekrutmen

Masih terdapat kekosongan pada anggota komite pemantau risiko

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
N O	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT	PERINGKAT
1	KOMITE AUDIT A Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan B Komite Audit diketuai oleh Komisaris IndependenC Paling kurang 51 anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak IndependenD Anggota Komite Audit memiliki integritas akhlak dan moral yang baik	Bank telah membentuk Komite audit, komposisi komite audit telah memenuhi ketentuan regulator yang terdiri atas: 1. Lukman Hakim (Komisaris Independen/Ketua Komite Audit) 2. Eide Evana (Pihak Independen/Anggota Komite Audit) 3. M. Herjuno (Pihak Independen/Anggota Komite Audit)	1
2	KOMITE PEMANTAU RISIKO A Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risikoB Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris IndependenC Paling kurang 51 anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak IndependenD Anggota Komite Audit memiliki integritas akhlak dan moral yang baik	Komite Pemantau Risiko Purwanti Budiman (Komisaris Utama Independen) – Ketua sekaligus anggota Komite Lukman Hakim (Komisaris Independen) – anggota Komite Supreh (Pihak Independen) – anggota Komite (Kosong) – dalam Proses rekrutmen Masih terdapat kekosongan 1 anggota Komite Pemantau Risiko	3

3	<p>KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI A Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang pegawai perwakilanB Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan atau nominasi serta succession plan BankC Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris IndependenD Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 orangE Apabila membentuk Komite tersebut secara terpisah maka Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank dan Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan succession plan Bank</p>	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi ">1. Lukman Hakim/ Komisaris Independen - Ketua sekaligus anggota komite "> 2. Purwantari Budiman/ Komisaris Utama Independen- anggota komite "> 3. Zaidirina/ Komisaris Non Independen- anggota komite ">4. Ahmad Jahri/ Perwakilan Pegawai- anggota komite ">5. Mutia Citra/ Pihak Independen- anggota Komite</p>	3
4	<p>Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan mrpkan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain</p>	<p>Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko merupakan Pihak Independen.</p>	1
5	<p>Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama Bank lain dan atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi kriteria independensi kerahasiaan kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab</p>	<p>Rangkap Jabatan pihak independen telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p>	2
6	<p>Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan kepengurusan kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen</p>	<p>Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan/kepengurusan/kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan Bank.</p>	1
7	<p>Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi pengawas atau pihak pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu cooling off selama 6 enam bulan</p>	<p>Pihak independen bukan berasal dari anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif bank.</p>	2
8	<p>Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51 dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen</p>	<p>Rapat Komite Audit telah dilaksanakan dan memenuhi ketentuan kuorum; Rapat Komite Pemantau Risiko telah dilaksanakan dan memenuhi ketentuan kuorum;</p>	2

9	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang dihadiri 51 dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai	Rapat Komite Remunerasi telah dilaksanakan dan memenuhi ketentuan kuorum.	2
10	Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik	Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap komposisi komite.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			3

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	<p>KOMITE AUDIT Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris</p> <p>1. Komite Audit telah melakukan pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan</p> <p>2. Komite Audit telah melakukan review terhadap 1 pelaksanaan tugas SKAI 2 kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik KAP dengan standar audit yang berlaku 3 kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dan 4 pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank</p> <p>3. Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris</p>	<p>Sesuai Surat Dewan Komisaris Nomor :</p> <p>1. 154/DK/BL-2/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 perihal Evaluasi Satuan Pengawas Intern;</p> <p>2. 185/DK/BL-2/VIII/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 perihal penyampaian hasil evaluasi KAP atas pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Tahun 2016</p> <p>3. 243/DK/BL-2/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal review Laporan Keuangan Publikasi per 30 September 2017</p> <p>4. 146/DK/BL-2/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal tindak lanjut Management letter KAP</p> <p>5. 183/DK/BL-2/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 perihal tindak lanjut Management letter KAP.</p> <p>6. 185/DK/BL-2/XI/2016 tanggal 2 November 2016 perihal tindak lanjut hasil temuan audit eksternal dan Internal</p> <p>7. 255/DK/BL-2/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Penunjukan KAP untuk pelaksanaan Audit Laporan Keuangan PT. Bank Lampung Tahun Buku 2017</p>	2
2	<p>KOMITE PEMANTAU RISIKO Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris</p> <p>A Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko B Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko SKMR</p>	<p>Sesuai Surat Dewan Komisaris Nomor : 299/DK/BL-2/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Lampung Triwulan III Tahun 2017.</p>	2
3	<p>KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI</p> <p>1. Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi telah disampaikan kepada RUPS dan Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi</p> <p>2. Terkait dengan kebijakan nominasi Komite telah menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan ataufenggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS</p> <p>3. Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS</p> <p>4. Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris</p>	<p>1. 254/DK/BL-2//X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal arahan Dewan Komisaris atas hasil pekerjaan konsultan penyusunan BPP Tata Kelola Remunerasi PT. Bank Lampung</p> <p>2. 283/DK/BL-2/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 Evaluasi dan Kajian cut off iuran dana pensiun Direksi.</p> <p>3. 287/DK/BL-2/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 perihal arahan draft ke-2 penyusunan BPP remunerasi sesuai POJK 45</p> <p>4. Bank telah memiliki pedoman dan prosedur penggantian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) sebagaimana tertuang dalam SK Dewan Komisaris No. 02/DK/BL-2/II/2017</p>	2

4	Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank	Mekanisme rapat komite dilaksanakan sesuai pedoman dan tata tertib kerja komite serta mekanisme hubungan kerja Dekom, Direksi, Komite dan Group-Group.	2
5	Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat	Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.	2
6	Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris	Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi dan ditindaklanjuti dengan Surat Dewan Komisaris.	2
7	Pemilik melakukan intervensi thd pelaksanaan tugas Komite spt mis terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kpd pihak terkait pemilik rekomendasi calon Dewan Komisaris Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan atau penggantian yang tlt ditetapkan	Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas komite.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			3

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Hasil risalah rapat wajib dibuat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat disenting opinions secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik	Risalah rapat telah dibuat dan didokumentasikan dengan baik.	2
2	Masing masing Komite tlt melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku spt misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kpd Dewan Komisaris	Kecukupan Komposisi Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi belum memenuhi ketentuan yang berlaku.	3
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			3

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
4	Benturan Kepentingan	2

Tujuan

Governance Structure, Governance Process, Governance Outcome Bank berada pada peringkat 2 (Baik), dimana Bank telah memiliki pedoman penanganan benturan kepentingan dan dalam pelaksanaannya pengungkapan atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan telah didokumentasi dengan baik.

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Bank memiliki kebijakan sistem dan prosedur penyelesaian mengenai 1 Benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai 2 Administrasi dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah rapat	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan, sesuai dengan SK Direksi Nomor 121/DIR/KPH/X/2012 Tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Penanganan Benturan Kepentingan dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris anggota Direksi dan pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dpt merugikan atau mengurangi keuntungan Bank	Tidak terdapat benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian/atau mengurangi keuntungan Bank.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Benturan kepentingan yang dpt merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik	Benturan kepentingan telah diungkapkan dan telah didokumentasikan dengan baik.	2
2	Kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik pihak terkait pihak lainnya yang dpt menimbulkan benturan kepentingan yang dpt merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank	Sebagai bank milik pemerintah daerah, Bank Lampung telah berupaya untuk menghindarkan diri dari intervensi pemilik terhadap operasional bank	3
3	Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi	Sampai dengan saat ini tidak terdapat benturan kepentingan kepada Bank yang belum terselesaikan	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
5	Fungsi Kepatuhan Bank	3

Tujuan

Governance Structure, *Governance Process* dan *Governance Outcome* Bank berada pada peringkat 3 (cukup baik), hal ini tercermin dari :

- Budaya kepatuhan bank belum seluruhnya dipahami dan diterapkan oleh pegawai bank terutama di kantor Operasional walaupun telah dilakukan sosialisasi, hal ini tercermin dengan intensitas pelanggaran yang cukup tinggi.
- Review dan penyusunan kebijakan sesuai kondisi Bank saat ini belum dilakukan secara menyeluruh.

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Satuan Kerja Kepatuhan Independen terhadap satuan kerja operasional	Berdasarkan Organisasi Bank dan uraian tugas, Satuan Kerja Kepatuhan telah independent terhadap satuan kerja operasional, dan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan sesuai SK Direksi PT. Bank Lampung Nomor 57/DIR/KPH/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013, namun pelaksanaannya belum efektif.	3
2	Pengangkatan pemberhentian dan atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia	Pengangkatan dan pemberhentian Direktur Kepatuhan mengacu dan berpedoman kepada ketentuan Regulator.	2
3	Bank telah menyediakan sumberdaya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Bank terus berupaya maksimal guna meningkatkan kompetensi SDM pada Satuan Kerja Kepatuhan	3
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			3

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT

1	<p>Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain</p> <p>A Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui Menetapkan langkah langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati hatian Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang</p> <p>B menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank</p> <p>C merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank</p> <p>D mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi</p> <p>E menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank</p> <p>F memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang undangan yang berlaku</p> <p>G meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank</p> <p>H melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan KCBA tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang undangan yang berlaku</p> <p>I melakukan tugas tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan</p>	<p>Masih terdapat pelanggaran - pelanggaran terhadap SOP dan ketentuan - ketentuan Internal Bank.</p>	3
2	<p>Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p>Syarat dan ketentuan untuk menjadi Direktur Kepatuhan telah dipenuhi dan telah ditetapkan pada RUPSLB Lanjutan Tgl. 3 Mei 2013.</p>	2
3	<p>Direksi telah A Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif B bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan pedoman sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait C bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan</p>	<p>Direksi telah menetapkan beberapa kebijakan/pedoman terkait fungsi kepatuhan dan telah dilaksanakan beberapa sosialisasi kebijakan. Namun belum seluruh kebijakan kepatuhan terpenuhi.</p>	3

4	<p>Satuan Kerja Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain A membuat langkah langkah dalam rangka mendukung terciptaya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha pada setiap jenjang organisasi B melakukan identifikasi pengukuran monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum C menilai dan mengevaluasi efektivitas kecukupan dan kesesuaian kebijakan ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang undangan yang berlaku D melakukan review dan atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang undangan yang berlaku E melakukan upaya upaya untuk memastikan bahwa kebijakan ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangan undangan yang berlaku F melakukan tugas tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan</p>	<p>Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, namun belum efektif antara lain: Penerapan Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan dan jenjang organisasi yang belum maksimal;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dan pemantauan tindak lanjut penyelesaian temuan audit eksternal maupun internal belum optimal ; 2. Pemberian Sanksi bagi Pegawai PT. Bank Lampung yang belum efektif dan maksimal; 3. Evaluasi, efektivitas kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan sistem/prosedur yang dimiliki oleh Bank, diantaranya telah diterbitkannya Kebijakan Operasional Bank Lampung, SOP Tata Cara Penyusunan Pedoman Operasional, menyampaikan informasi data terkini tentang peraturan-peraturan regulator kepada seluruh satuan kerja belum dilakukan secara menyeluruh; 	3
---	--	---	---

PERINGKAT

Sub-Faktor 2: Governance Process

3

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan Pihak terkait	Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan dan tugas Direktur Kepatuhan kepada Regulator secara berkala.	2
2	Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan BI yang berlaku	Cakupan Laporan telah sesuai dengan ketentuan Regulator.	2
3	Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku	Belum sepenuhnya berhasil dilakukan sesuai ketentuan.	3
4	Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank	Belum sepenuhnya berhasil dilakukan sesuai ketentuan.	3

PERINGKAT

Sub-Faktor 3: Governance Outcome

3

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
6	Fungsi Audit Intern	2.6667

Tujuan

- *Governance Structure* Bank berada pada peringkat 2 (baik), Secara struktural SKAI telah independen terhadap kegiatan operasional bank dan Pengawasan Bank telah berdasarkan kepada SPFAIB.
- *Governance Process* Bank berada pada peringkat 3 (cukup baik), masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap beberapa hal diantaranya :Dalam pelaksanaannya audit masih fokus pada kegiatan-kegiatan operasional dan kualitas kinerja, sedangkan penilaian kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern bank belum optimal. Audit belum didukung sistem informasi yang memadai, Rencana pemeriksaan SKAI belum terealisasi secara keseluruhan.
- *Governance Outcome* Bank berada pada peringkat 3 (cukup baik), masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap beberapa hal diantaranya : Pelaksanaan audit belum mencakup keseluruhan unit kerja, proses audit berbasis risiko belum dilakukan secara optimal.

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang secara struktural berada di bawah supervisi Direktur Utama.	2
2	Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank SPFAIB dengan Menyusun Piagam Audit Intern Internal Audit Charter Membentuk Satuan Kerja Audit Intern SKAI Menyusun Panduan Audit Intern	Pengawasan Bank telah berdasarkan kepada SPFAIB	2
3	Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional	Secara struktural SKAI telah independen terhadap kegiatan operasional bank.	2
4	Bank menyediakan sumberdaya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM SKAI perlu meningkatkan kemampuan/skill dibidang kredit, dana, APU/PPT dll. 2. Ketersediaan SDM dengan kompetensi sebagai auditor terbatas, terutama dibidang kredit, Manajemen Risiko dan akuntansi. 3. Jumlah personil juga tidak memadai dibandingkan jumlah kantor cabang operasional /Bank. 4. Belum tersedianya aplikasi audit yang terstruktur/tersistem dalam menunjang kinerja audit intern. 	3
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Direksi bertanggungjawab atas A Terciptanya struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen	Bank telah memiliki kebijakan pengendalian intern dan telah menunjuk Group Internal Audit untuk memastikan bahwa internal kontrol telah dilaksanakan oleh seluruh pegawai dan unit kerja terkait. Telah dilakukan pembahasan tindak lanjut evaluasi kinerja SKAI setiap tahunnya. Struktur pengendalian intern belum berjalan secara optimal	3
2	Direksi bertanggungjawab atas B Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris	Tindak lanjut temuan audit intern telah sesuai arahan dari pengurus dan penyelesaian temuan yang berulang terus dilaksanakan, namun penyelesaian terhadap laporan hasil audit masih perlu ditingkatkan.	3
3	BANK TELAH Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pelaksanaannya Internal Audit belum melakukan audit terhadap Satuan Kerja Manajemen Risiko. 2. Jumlah SDM dan kompetensi pemeriksa (auditor) terutama di bidang IT masih belum memadai. 	3

4	Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun	Review dan kaji ulang oleh eksternal atas efektifitas pelaksanaan kerja Group Internal Audit telah dilakukan secara berkala (setiap tiga tahunan), selanjutnya telah dijadwalkan sampai akhir tahun 2017 untuk dilakukan review dan kaji ulang kembali terhadap Internal Audit oleh pihak eksternal .	2
5	Rencana pemeriksaan SKAI Bank kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai	Rencana kerja telah disusun, namun perlu ditingkatkan kedalaman dan realisasi pemeriksaannya.	3
6	Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank	Rencana pemeriksaan SKAI belum terealisasi secara keseluruhan.	3
7	Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu ketrampilan Sumber Daya Manusia secara berkala dan berkelanjutan	Bank telah memberikan pembekalan secara berkala kepada auditor untuk meningkatkan kompetensi antara lain dengan mengikuti diklat dan seminar.	2
8	SKAI telah Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit	Group Internal Audit telah melakukan pengawasan secara berkala, namun cakupannya belum termasuk audit terhadap seluruh aspek.	3
9	SKAI telah melaksanakan tugas sekurang kurangnya meliputi penilaian a Kecukupan sistem Pengendalian Intern Bank b Efektifitas sistem Pengendalian Intern Bank c Kualitas Kinerja	Telah dilakukan tetapi belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan dan/atau dokumentasi yang baik	3
10	SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku	Group Internal Audit telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan kepada manajemen.	2
11	SKAI telah memantau menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee	Dalam Laporan Hasil pemeriksaan audit intern telah mencakup tindak lanjut hasil pemeriksaan periode sebelumnya.	3
12	SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku	Group internal Audit sedang menyusun dan mengkinikan pedoman Pemeriksaan serta sistem dan prosedur kerja secara berkala.	3
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			3

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME

NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Direksi bertanggungjawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS	Laporan hasil pelaksanaan fungsi audit intern telah disampaikan kepada Komisaris, yang nantinya akan diteruskan ke RUPS.	2
2	Temuan temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang	Masih ada beberapa temuan oleh Internal Audit yang sifatnya berulang.	4
3	SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit	Pelaksanaan audit oleh SKAI dilaksanakan seobyektif mungkin.	3
4	Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan a I A Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pd masing masing unit	1. Pelaksanaan audit belum mencakup keseluruhan unit kerja 2. Proses audit berbasis risiko belum dilakukan secara optimal	4
5	Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan a I B Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip prinsip SPFAIB a I terpenuhinya independensi obyektivitas tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern	Program audit telah sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB;	2

6	Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan a l C Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern	1. Pelaksanaan audit belum mencakup keseluruhan unit kerja 2. Proses audit berbasis risiko belum dilakukan secara optimal 3. Jumlah dan kualitas Auditor masih belum terpenuhi, sehingga fungsi audit intern belum optimal.	3
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			3

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
7	Fungsi Audit Ekstern	2

Tujuan

Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome Bank berada pada peringkat 2 (Baik), hal ini tercermin dari Audit Ekstern yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, dan proses penunjukkan Kantor Akuntan Publik telah berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit dan persetujuan Dewan Komisaris serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang kurangnya memenuhi aspek ndash aspek Kapasitas KAP yang ditunjuk Legalitas perjanjian audit Ruang lingkup audit Standar Profesional akuntan publik dan Komunikasi Bank Indonesia dengan KAP dimaksud	Penugasan atau penunjukkan Akuntan Publik telah sesuai dengan syarat dan ketentuan OJK dan ketentuan internal Bank - Penugasan Akuntan Publik dilakukan dengan perjanjian tertulis, dan perjanjian tersebut telah memenuhi aspek-aspek hukum sebuah perjanjian.	1
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik KAP yang terdaftar di Bank Indonesia	Penunjukan Kantor Akuntan Publik telah memperhatikan latar belakang dan legalitas kantor KAP yang bersangkutan.	1
2	Penunjukan Akuntan publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	Penunjukan Akuntan publik dan KAP oleh Bank telah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	1
3	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris	Penunjukan Akuntan Publik telah berdasarkan rekomendasi Dewan komisaris	1
4	Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk mampu bekerja secara independen memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan	Akuntan publik melaksanakan audit dengan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan.	1
5	Akuntan Publik telah berkomunikasi dengan Bank Indonesia mengenai kondisi bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit	Akuntan publik telah berkomunikasi dengan Regulator dalam rangka persiapan audit	1
6	Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional	Akuntan publik bekerja meliputi, pemeriksaan, pengujian, bukti bukti yang mendukung jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dengan demikian memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat	1
7	Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan Management Letter kepada Bank Indonesia	KAP telah menyampaikan laporan keuangan hasil audit dan management latter ke Regulator tepat waktu.	1
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia oleh KAP yang ditunjuk	Hasil audit oleh KAP telah menggambarkan permasalahan yang signifikan khususnya terkait dengan kinerja keuangan bank.	1
2	Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku	Ruang lingkup audit telah dituangkan dalam perjanjian kerja.	2
3	Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit	Auditor Eksternal telah berupaya melakukan tugas audit secara obyektif.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
8	Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3

Tujuan

- *Governance Structure* Bank berada pada peringkat 3 (cukup baik), *Struktur penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun implementasinya masih belum optimal;*
- *Governance Process* Bank berada pada peringkat 3 (cukup baik), hal ini tercermin dari:
 1. Belum sepenuhnya kecukupan infrastruktur (adanya tools risiko) dalam mengendalikan risiko sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 2. Telah dilakukan sosialisasi budaya sadar risiko secara bertahap kepada seluruh jenjang organisasi secara berkelanjutan, namun implementasinya belum maksimal.
 3. Bank telah memiliki beberapa aplikasi dan kebijakan dalam mendukung penerapan manajemen risiko, diantaranya
 1. Tingkat Kesehatan Bank (terdiri atas :Profil Risiko, GCG, Earning dan Capital);
 2. Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP);
 3. Profil Risiko Cabang (PRC) dan Profil Risiko Kantor Pusat (PRKP);
 4. Stress Test Likuiditas akhir tahun;
 5. Rating Perusahaan Asuransi;
 6. Risk Control Self Assessment (RCSA).
- *Governance Outcome* Bank berada pada peringkat 3 (cukup baik), namun masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan	1. Bank telah memiliki struktur SKAI, SKMR serta Komite Manajemen Risiko dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Lampung 2. Sistem Pengendalian Intern telah ditetapkan melalui SK Direksi PT. Bank Lampung tentang Three Lines Of Defence .	2
2	Bank telah memiliki kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai	1. Bank telah menetapkan limi risiko melalui SK Direksi Nomor 12/DIR/MR/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penetapan Risk Limit, Risk Appetite dan Risk Tolerance PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, 2. Evaluasi/penyesuaian SK Risk Limit, Risk Appetite dan Risk Tolerance telah dilakukan melalui SK Direksi Nomor : 032/DIR/MR/IV/2017 tanggal 22 April 2017.	2

PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			3
SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya A menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil risk appetite dan toleransi risiko risk tolerance	Bank telah selesai membuat Kebijakan Manajemen Risiko Bank Lampung yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 122/DIR/MR/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	1
2	Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya B mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan, strategi dan rencana bisnis Bank sesuai dengan tugas tanggung jawab dekom. Sebagaimana Pedoman tata tertib kerja yang mengatur mekanisme kerja sesuai tugas dan wewenang Dewan Komisaris, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal.	3
3	Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya C mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif	Dewan Komisaris telah memberikan evaluasi, saran dan arahan kepada Direksi sebagaimana telah ditindaklanjutnya progress perbaikan hasil penilaian GCG atas prudential meeting OJK tanggal 31 Desember 2016 dan telah dilaporkan perkembangan setiap triwulan.	2
4	Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya A menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan strategi dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud	Direksi telah memiliki pedoman tata tertib kerja yang mengatur mekanisme kerja sesuai tugas dan wewenang direksi 1. Kebijakan Manajemen Risiko Bank Lampung termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk dalam penetapan limit risiko yang telah diakomodir dalam corporate plan dan business plan. 2. Bank telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi No. 158/DIR/MR/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Manajemen Risiko Operasional.	1

5	Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya B menyusun menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi mengukur memonitor dan mengendalikan risiko	Bank telah memiliki beberapa aplikasi dan kebijakan dalam mendukung penerapan manajemen risiko, diantaranya 1. Profil Risiko Kantor Operasional (PRKO) 2. Profil Risiko Kantor Pusat (PRKP) 3. <i>Risk Control Self Assessment</i> (RCSA). 4. Los Even Database (LED) Telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 159/DIR/MR/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan SOP Manajemen Risiko Operasional Bank telah memiliki aplikasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko. Diantaranya : Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko, GCG, ICAAP dan Rating Asuransi. Sudah dilakukan secara berkala dan disampaikan kepada OJK tepat waktu.	1
6	Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya C menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan	Bank telah memiliki kebijakan untuk persetujuan kredit, transaksi treasury maupun aktivitas transaksi keuangan lainnya.	2
7	Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya D mengevaluasi dan atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank eksposur risiko dan atau profil risiko secara signifikan	Evaluasi dan atau Pengkinian kebijakan strategi dan kerangka Manajemen Risiko telah dilaksanakan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Direksi Nomor 159/DIR/MR/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	2
8	Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya E menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko	Bank telah memiliki Struktur Organisasi, Pembagian wewenang dan tanggungjawab yang jelas.	2
9	Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya F bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko	Direksi telah memberikan arahan untuk perbaikan Tingkat Kesehatan Bank maupun Laporan Profil Risiko.	2
10	Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya G memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah langkah perbaikan yang telah sedang dan akan dilakukan	Direksi telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan tindak lanjut seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut disertai langkah-langkah perbaikan yang telah sedang dan akan dilakukan, kepada Dewan Komisaris, tetapi dalam langkah-langkah perbaikannya belum optimal.	3
11	Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya H memastikan pelaksanaan langkah langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI	Tindak lanjut perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI masih belum optimal.	3

12	Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya I mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif	Telah dilakukan sosialisasi budaya sadar risiko secara bertahap kepada seluruh jenjang organisasi secara berkelanjutan, baik dengan melakukan kunjungan ke kantor operasional maupun sosialisasi/inhouse training dengan mengikut sertakan seluruh risk taking unit.	2
13	Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya J memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko	Group Manajemen Risiko telah menyampaikan secara berkala analisa perhitungan kecukupan penyediaan modal minimum dan perhitungan internal capital adequacy assessment process	2
14	Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya K memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi pengukuran pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi	Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas secara independen sesuai dengan ketentuan Regulator	1
15	Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal	Group Manajemen Risiko telah memiliki beberapa aplikasi dalam mendukung penerapan manajemen risiko diantaranya : 1. Profil Risiko Kantor Operasional (PRKO) 2. Profil Risiko Kantor Pusat (PRKP) 3. Risk Control Self Assessment (RCSA). 4. Los Even Database (LED)	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			3

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan kebijakan usaha ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank	Penerapan Manajemen Risiko secara efektif belum terlaksana dengan baik.	3
2	Komisaris dan Direksi Manajemen mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko	Komisaris dan Direksi belum sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.	3
3	Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian	Sampai dengan pelaporan ini, aktivitas bisnis yang dilakukan bank tidak melampaui kemampuan permodalan.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			3

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
9	Prinsip Kehati hatian Dalam Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar	2

Tujuan

- *Governance Structure* Bank berada pada peringkat 2 (baik), hal ini tercermin dengan telah dibuatnya Kebijakan, sistem dan prosedur tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- *Governance Process* Bank berada pada peringkat 2 (baik), Proses penyediaan dana besar dan dana kepada pihak terkait telah diatur dalam KPBL dan mengacu kepada prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sesuai dengan ketentuan regulator;
- *Governance Outcome* Bank berada pada peringkat 2 (baik), secara umum telah terlaksana dengan baik, dimana Penyaluran dana besar dan dana kepada pihak terkait telah mempertimbangkan BMPK dan kemampuan permodalan.

Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan kepada regulator.

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Bank telah memiliki kebijakan sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya	Bank telah memiliki kebijakan tertulis mengenai Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimana tertuan dalam Kebijakan Perkreditan Bank Lampung (KPBL) pada artikel 230. Selain itu kebijakan, sistem dan prosedur tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah diatur didalam Kebijakan Perkreditan Bank Lampung (KPBL) dan Buku Pedoman Perusahaan Divisi Treasury dan telah ditetapkan melalui : SK. Direksi Nomor 51/DIR/KRD/VI/2015 tanggal 22 Mei 2015 SK. Direksi Nomor 35/DIR/TSR/III/2012 tentang Pedoman Operasional Transaksi Treasury	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2
SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku	Kebijakan BMPK pada Kebijakan Perkreditan Bank Lampung (KPBL) telah sesuai dengan ketentuan BI yaitu PBI No.8/13/PBI/2006 tentang perubahan atas PBI No.7/3/PBI2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.	2
2	Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati hatian	Proses penyediaan dana besar dan dana kepada pihak terkait telah diatur dalam KPBL dan mengacu kepada prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sesuai dengan ketentuan regulator Proses penyediaan dana melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian melalui Analisa Money Market Line Bank Counterpart	2
3	Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya	Pemberian kredit kepada pihak terkait harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris. Seluruh keputusan transaksi dan investasi Treasury dilakukan secara independen dengan berpedoman pada kebutuhan bisnis Bank.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			2
SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah a memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BMPK dan memerhatikan prinsip kehati hatian maupun perundang undangan yang berlaku b memerhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran diversifikasi portofolio penyediaan dana	Penyaluran dana besar dan dana kepada pihak terkait telah mempertimbangkan BMPK dan kemampuan permodalan. BPMK kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal Bank	2
2	Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia secara tepat waktu	Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan kepada BI.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
10	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal	2

Tujuan

Governance Structure, Governance Process dan *Governance Outcome* Bank berada pada peringkat 2 (baik), secara umum telah terlaksana dengan baik, dimana :

- Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- Bank telah mempublikasikan dan telah menyampaikan kewajiban pelaporan kepada regulator sesuai periode pelaporan dan ketentuan yang berlaku.
- Informasi produk telah disampaikan melalui media internet, pamflet, brosur dan media publikasi lain yang mudah dimengerti oleh nasabah.

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	2
2	Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku	Bank telah menyusun dan melaporkan pelaksanaan GCG, dan cakupan laporan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dipublikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.	2
3	Tersedianya pelaporan internal yang lengkap akurat dan tepat waktu yang didukung oleh SIM yang memadai	Belum seluruhnya pelaporan internal bank didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.	3
4	Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan IT security system yang memadai	Bank telah memiliki Sistem Informasi penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sesuai Profil Risiko (ICAAP), yang pelaksanaannya dikelola secara terintegrasi dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku	Bank telah mempublikasikan laporan keuangannya dan telah melaporkan kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.	1
2	Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah antara lain A informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan	Penyampaian informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan.	2
3	Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah antara lain B Petugas Bank Customer Service dan Marketing telah menjelaskan informasi informasi produk kepada nasabah	Bank telah menyampaikan informasi produk Bank melalui brosur, reklame, pamflet, surat kabar, dan media online.	2
4	Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah antara lain C informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya	Informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.	2

5	Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah antara lain D Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan perubahan informasi produk	Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan perubahan informasi produk.	2
6	Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah antara lain E informasi informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti	Informasi produk telah disampaikan melalui media internet, pamflet, brosur dan media publikasi lain yang mudah dimengerti oleh nasabah.	2
7	Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah antara lain F Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat	Layanan informasi produk belum berjalan dengan maksimal.	3
8	Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah antara lain G Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah	Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah.	2
9	Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah antara lain H nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut	Nasabah telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya, akan tetapi data tersebut tidak boleh disebar luaskan tanpa persetujuan nasabah.	2
10	Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan	Mekanisme pengaduan nasabah telah diatur dalam ketentuan internal dan hal ini telah dikomunikasikan dengan nasabah. Penyelesaian sengketa kepada nasabah telah dikelola dan terus ditingkatkan sesuai dengan ketentuan regulator.	2
11	Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan	Bank telah menyusun dan melaporkan pelaksanaan GCG, dan cakupan laporan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	2
12	Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Bank telah menyusun dan melaporkan pelaksanaan GCG, dan cakupan laporan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	2
13	Dalam hal Laporan Pelaksanaan GCG tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Bank Indonesia dan bagi Bank yang telah memiliki homepage wajib mempublikasikannya pula pada homepage Bank	Bank melakukan penyesuaian apabila terdapat perbedaan penilaian dengan regulator. Laporan Pelaksanaan GCG telah di Publikasikan melalui home page bank sesuai periode laporan dan ketentuan yang berlaku.	2
14	Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam hasil penilaian self assessment pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia Bank a Paling kurang melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor GCG dan Definisi Peringkat hasil penilaian self assessment dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat b Segera menyampaikan revisi hasil penilaian self assessment GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia dan bagi Bank yang telah memiliki homepage wajib mempublikasikannya pula pada homepage Bank	Apabila terdapat perbedaan penilaian dengan regulator akan disesuaikan atau direvisi sebagaimana mestinya. Bank akan mengkomunikasikan penyelesaian perbedaan yang dimaksud kepada OJK/BI baik secara tertulis maupun secara verbal.	2

PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			2
SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang kurangnya kepada a Bank Indonesia b Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI c Lembaga Pemeringkat di Indonesia d Asosiasi Bank Bank di Indonesia e Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia LPPI f 2 dua Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan g 2 dua Majalah Ekonomi dan Keuangan	Bank telah menyampaikan laporan Tahunan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	2
2	Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada homepage Bank meliputi a Laporan Tahunan keuangan dan non keuangan b Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang kurangnya dalam 1 satu surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank atau di tempat kedudukan KCBA	Bank telah mempublikasikan laporan keuangan sesuai ketentuan.	2
3	Laporan Pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian self assessment Bank dan dilampiri hasil penilaian self assessment serta paling kurang mencakup a cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam PBI GCG dan hasil penilaian self assessment atas pelaksanaan GCG b kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain anggota Direksi dan atau pemegang saham Bank c kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain anggota Direksi dan atau pemegang saham Bank d kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris anggota Direksi lain dan atau pemegang saham Bank e paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris serta Direksi f shares option yang dimiliki Komisaris Direksi dan Pejabat Eksekutif g rasio gaji tertinggi dan gaji terendah h frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan i jumlah penyimpangan internal fraud yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank j transaksi yang mengandung benturan kepentingan k buy back shares dan atau buy back obligasi Bank l pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik baik nominal maupun penerimaan	Laporan Pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya dan cakupan laporan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	2
4	Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan kepada a Bank Indonesia b Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI c Lembaga Pemeringkat di Indonesia d Asosiasi Bank Bank di Indonesia e Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia LPPI f 2 dua Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan g 2 dua Majalah Ekonomi dan Keuangan	Laporan pelaksanaan GCG kepada lembaga-lembaga terkait sesuai dengan ketentuan regulator secara tepat waktu.	2
5	Laporan pelaksanaan GCG telah disajikan dalam homepage secara tepat waktu	Laporan GCG telah disajikan dalam homepage Bank, publikasi laporan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.	2
6	Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik	Bank terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, tercermin dengan telah disampaikannya laporan tentang tindak lanjut penyelesaian pengaduan nasabah.	2

7	Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah	Transparansi Informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah telah dilaksanakan sesuai prosedur internal bank dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan regulator yang berlaku.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2
NO	ASPEK YANG DINILAI		NILAI
11	Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank Umum		3

Tujuan

- *Governance Structure, Governance Process* dan *Governance Outcome* Bank berada pada peringkat 3 (cukup baik), namun masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap: Komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank, Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang dinilai oleh Regulator belum realistis atas pencapaian dari target-target yang telah ditetapkan, komprehensif dan terukur serta penyusunan RBB dan *Corporate Plan* belum didukung oleh sistem dan prosedur yang memadai;
- Penyusunan dan penyampaian RBB telah memperhatikan ketentuan OJK, faktor eksternal, dan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat, namun belum maksimal.

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi corporate plan dan Rencana Bisnis business plan sesuai dengan visi dan misi Bank	Bank telah menyusun <i>Corporate Plan</i> dan <i>Bussiness Plan</i> sesuai dengan visi dan misi Bank.	2
2	Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank	Dukungan pemilik dalam bentuk modal setor belum maksimal.	3
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			3

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis komprehensif terukur achievable dengan memperhatikan prinsip kehati hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal	Bank telah berupaya menyusun RBB secara realistis, komprehensif dan terukur sesuai dengan kemampuan Bank.	3
2	Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris	Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.	2
3	Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada a Pemegang Saham Bank b Seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank	Rencana Bisnis telah dikomunikasikan kepada Pemegang Saham dan seluruh jenjang organisasi Bank.	2
4	Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank RBB secara efektif	Rencana Bisnis Bank belum sepenuhnya terpenuhi, diantaranya Rencana penerbitan produk dan aktivitas baru, penerimaan pegawai dan pembukaan kantor cabang baru.	3
5	Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah memperhatikan a faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank b prinsip kehati hatian c penerapan manajemen risiko d azas perbankan yang sehat	Penyusunan RBB telah sesuai dengan ketentuan OJK namun belum mencakup seluruh faktor eksternal dan internal Bank.	3

6	Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank	Dewan Komisaris telah menyampaikan evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank dan melakukan pemantauan terhadap pencapaian target-target bisnis Bank.	2
7	Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank	Sebagian Pemilik belum menunjukkan keseriusan dalam memperkuat permodalan Bank.	3
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			3

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT	PERINGKAT
1	Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris	Rencana Korporasi dan Bisnis telah disusun Direksi, dan disetujui oleh Komisaris.	2
2	Rencana Korporasi corporate plan dan Rencana Bisnis Bank business plan beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank	Rencana Bisnis bank disusun sebagai acuan pelaksanaan operasional bank periode masa yang akan datang dan sifatnya berkesinambungan serta memberikan manfaat bagi stake holder.	2
3	Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan	Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan, Manajemen telah mengadakan rapat Direksi dan rapat koordinasi dalam menetapkan langkah-langkah strategis dan kongkrit pencapaian target Rencana Bisnis Bank dan <i>Corporate Plan</i> , namun realisasi dan implementasinya belum sepenuhnya terlaksana.	3
4	Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi stakeholders	Pertumbuhan Bank telah memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi <i>stakeholders</i> , baik berupa pembagian deviden bagi pemegang saham, adanya penyaluran kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah, adanya penyaluran dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) yang dialokasikan dan disalurkan sesuai peruntukannya.	2
5	Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman SWOT Analysis	Penyusunan dan penyampaian RBB telah memperhatikan ketentuan OJK, faktor eksternal, dan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat, namun belum maksimal.	3
6	Rencana strategis bank harus didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM IT jaringan kantor kebijakan dan prosedur	Rencana strategis Bank telah didukung dengan penyiapan infrastruktur, SDM IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur internal bank secara bertahap, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang menyebabkan tujuan strategis Bank tidak sepenuhnya tercapai.	3
7	Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank	Keseriusan pemilik untuk mendukung rencana strategis bank belum tercermin dalam dukungan permodalan. Akan dilakukan pendekatan kepada Pemegang Saham untuk melakukan penambahan modal Bank dalam bentuk modal setor.	3
8	Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku	Kondisi permodalan Bank masih mencukupi, akan tetapi keseriusan pemilik untuk mendukung rencana strategis bank belum tercermin dalam dukungan permodalan.	3
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			3

Tanggal: 17-01-2018

Tanggal: 17-01-2018

Disiapkan Oleh :

Disetujui Oleh :

A. KARIM GUSANI
GROUP HEAD KEPATUHAN DAN HUKUM

ERIA DESOMSONI
DIREKTUR UTAMA